

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TERJADINYA
FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING:
PERSPEKTIF FRAUD PENTAGON THEORY
(Studi Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan)**

BUDIMAN TERI



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA
FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING:
PERSPEKTIF FRAUD PENTAGON THEORY
(Studi Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan)**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

**BUDIMAN TERI
A31116303**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA *FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING:* PERSPEKTIF *FRAUD PENTAGON THEORY*

(Studi Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan)

Disusun dan diajukan oleh

BUDIMAN TERI

A31116303

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 20 Juni 2021

Pembimbing I

Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., M.Soc, Sc., Ak., CA
NIP 196703191992032003

Pembimbing II

Dr. Hj. Sri Sundari SE., M.Si., Ak.CA
NIP 196602201994122001

Ketua Departemen Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 196604051992032003

SKRIPSI

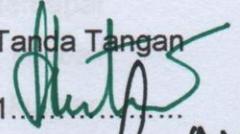
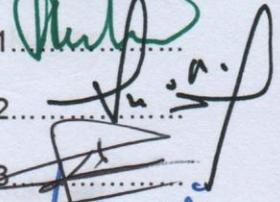
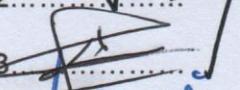
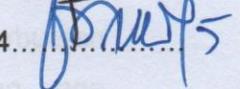
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING: PERSPEKTIF FRAUD PENTAGON THEORY (Studi Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan)

Disusun dan diajukan oleh

BUDIMAN TERI
A31116303

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 1 Juli 2021 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., M.Soc, Sc., Ak., CA	Ketua	1. 
2.	Dr. Hj. Sri Sundari SE., M.Si., Ak. CA	Sekretaris	2. 
3.	Prof. Dr. H. Arifuddin, S.E., Ak., M.Si., CA	Anggota	3. 
4.	Dr. Darwis Said, S.E, Ak., M.SA., CSRS., CSRA	Anggota	4. 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP

NIP 19660405 199203 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Budiman Teri

NIM : A31116303

Departemen/program studi : Akuntansi/Strata 1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya

Fraudulent Financial Reporting:

Perspektif Fraud Pentagon Theory

(Studi Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan)

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 7 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Budiman Teri
Budiman Teri

PRAKATA

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat kasih karunia serta anugerah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraudulent Financial Reporting: Perspektif Fraud Pentagon Theory (Studi Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak bisa lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan baik material maupun non-material dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan-Nya selama peneliti menjalani perkuliahan dari awal hingga akhir hingga tidak ada kesulitan berarti yang peneliti alami dan juga kesyukuran atas segala nikmat yang telah dianugerahkan selama peneliti menjalani perkuliahan.
2. Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi teladan dalam menjalankan setiap tindakan selama peneliti perkuliahan
3. Kedua orang tua terkasih dan tersayang, Bapak Teri dan ibu Hanisa serta saudara-saudaraku The Teri Brothers Muh Ramli Teri, Abd. Muhlis Teri, Muh. Yahya Teri dan Faiz Abdillah Teri, atas segala kasih sayang, nasihat, serta motivasi yang tak henti-hentinya diberikan kepada peneliti selama penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E.,M.Soc,Sc.,Ak.,CA selaku dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Sri Sundari SE., M.Si., Ak. CA selaku dosen Pembimbing II atas waktu yang diluangkan untuk membimbing, memberi

motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti selama proses penyusunan skripsi hingga selesai.

5. Bapak Drs. Kastumuni Harto, M.Si., Ak., CPA Bapak Drs.H. Muallimin M.Si., Ak. dan Ibu Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing peneliti selama kurang lebih 5 tahun dalam menjalani proses perkuliahan.
6. Tim penguji peneliti, Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, S.E., Ak., M.Si., CA dan Bapak Dr. Darwis Said, S.E, Ak., M.SA., CSRS., CSRA yang telah memberikan koreksi dan saran bagi peneliti dalam proses penyusunan skripsi.
7. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP selaku Ketua Departemen Akuntansi dan Bapak Dr. H. Syariffuddin Rasyid S.E., M.Si., CA., CRA., CRP selaku Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin serta pegawai Departemen Akuntansi atas perhatian, ilmu pengetahuan dan bantuan yang telah diberikan selama ini.
9. Untuk Keluarga Besar Penghuni Masjid Kampus Unhas yang telah menjadi keluarga yang tidak bosan menasehati, memberikan pelajaran hidup dan menjadi tempat untuk kembali dikala sulit sulitnya, menjadi tempat berbagi kebahagiaan dan juga duga
10. Untuk keluarga besar UKM LDM Darul Ilmi FEB-UH yang senantiasa menjadi keluarga, yang memberikan banyak sekali pelajaran dan wawasan untuk menjadi pribadi yang lebih berakhlak mulia.
11. Untuk Keluarga besar UKM LDK MPM Universitas Hasanuddin yang menjadi wadah untuk lebih mendekatkan diri kepada kebaikan

12. Untuk Keluarga Besar 1000 Guru Sulsel yang menjadi tempat belajar yang sangat berharga, terima kasih atas wawasan dan pengalamannya dan soft skill yang peneliti dapatkan. Terima Kasih Untuk Kak Appi dan Kak Darma dan tim Community Concultan 1000 guru yang begitu Luar Biasa menjadi kaka dan teman diskusi yang tdk ada lawan
13. Untuk Keluarga Besar #Obatmanjur yang telah mengajarkan untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas meskipun sulit, menjadi rumah dan tempat berbagi khususnya Kak Mangga, Kak Sahlan, Kak Fia dan seluruh Agen Obatmanjur
14. Kepada kawan di HIVE dan Sahabat Beasiswa yang telah menjadi wadah belajar yang luarbiasa
15. Kepada seluruh tim Ruang Beasiswa yang telah berjuang hingga kini ruang beasiswa semakin bertumbuh
16. Kepada Tim Lagaligo Leather Craft yang telah mengajarkan banyak hal khususnya dalam hal mindset bisnis
17. Untuk sahabatku tercinta sejak lama Muh Mahfud, Dewi Rahma Ente, Wahyu Ilahi Syam, Arif Fadillah dan Alda yang setia menemani pula, setia menjadi tempat keluh kesah, setia menjadi tempat terakhir untuk bercanda gurau melepas penat mengingat masa masa indah di sekolah dulu. Semoga kalian bisa mencapai mimpimu secepatnya
18. Untuk Teman teman Tarbiyah Halaqah Abu Bakar Assiddiq, yang setia menemani sejak masih mahasiswa baru hingga saat ini, menjadi teman yang sering menasehati. *See you on top!*
19. Untuk saudara sekamar dalam jangka waktu yang panjang Abd. Jalil. Terima kasih untuk kebersamaanya

20. Kepada Nurhaidah yang telah banyak membantu dalam skripsi ini juga banyak menasehati dan mendukung setiap aktivitas yang peneliti lakukan saat kuliah, menjadi teman diskusi dan teman bercanda hingga berbagi kisah

21. Teman-teman FAM16LIA Akuntansi 2016 terima kasih telah bersedia menjadi responden, memberikan bantuan dan semangat kepada peneliti.

Akhir kata peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu baik secara langsung dan tidak langsung ikut membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun yang akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang menggunakannya. Terima Kasih. Tuhan Memberkati.

Makassar, 23 Juni 2021

Budiman Teri

ABSTRAK

**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya
Fraudulent Financial Reporting:
Perspektif Fraud Pentagon Theory
(Studi Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan)**

Budiman Teri
Ratna Ayu Damayanti
Sri Sundari

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisa pengaruh kesesuaian kompensasi, gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal, perilaku tidak etis, kompetensi dan rangkap jabatan terhadap kecenderungan pegawai melakukan *fraudulent financial reporting* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data primer. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui penyebaran kuesioner dan dilakukan pada 62 responden yang merupakan pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, perilaku tidak etis, kompetensi dan rangkap jabatan berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan pegawai melakukan *fraudulent financial reporting* sedangkan kesesuaian kompensasi dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan melakukan *fraudulent financial reporting*

Kata Kunci: *kesesuaian kompensasi, gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal, perilaku tidak etis, kompetensi dan rangkap jabatan, fraudulent financial reporting*

ABSTRACT

***Factors that Influence the Occurrence of Fraudulent Financial Reporting:
Perspective of Pentagon Fraud Theory
(Study on Provincial Government of South Sulawesi)***

Budiman Teri
Ratna Ayu Damayanti
Sri Sundari

This study aims to examine and analyze the effect of compensation suitability, leadership style, internal control system, unethical behavior, competences, and job dualism against the tendency to commit fraudulent financial reporting on Provincial Government of South Sulawesi.

This research uses a quantitative approach. The data used in this research is primary data. Collecting data in this study through questionnaires and conducted on 62 respondents who were employee at Provincial Government of South Sulawesi. Analysis method that used to test the hypothesis is multiple linear regression.

The result of this study shows that leadership style, unethical behavior, competence, and job dualism has impact against the tendency to commit fraudulent financial reporting; meanwhile compensation suitability and internal control system has not impact against the tendency to commit fraudulent financial reporting

Keywords: *compensation suitability, leadership style, internal control system, unethical behavior, competences, job dualism, fraudulent financial reporting*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 <i>Fraud Pentagon Theory</i>	10
2.1.1 <i>Pressure</i>	12
2.1.2 <i>Opportunity</i>	13
2.1.3 <i>Rationalization</i>	14
2.1.4 <i>Competence</i>	15
2.1.5 <i>Arrogance</i>	17
2.2 Kecurangan (<i>Fraud</i>)	18
2.2.1 Definisi <i>Fraud</i>	18
2.2.2 Jenis-jenis <i>Fraud</i>	19
2.2.2.1 <i>Assets Misappropriation</i>	19
2.2.2.2 <i>Corruption</i>	19
2.2.2.3 <i>Fraudulent Financial Statements</i>	19
2.2.3 Pelaku <i>Fraudulent Financial Reporting</i>	20
2.2.4 Modus Terjadinya <i>Fraudulent Financial Reporting</i>	21
2.3 Penelitian Terdahulu	21
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis	24
2.5 Pengembangan hipotesis Penelitian.....	24
2.5.1 Pengaruh Kepuasan Kompensasi Terhadap Kecenderungan Melakukan <i>Fraudulent Financial Reporting</i>	24

2.5.2	Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kecenderungan Melakukan <i>Fraudulent Financial Reporting</i>	26
2.5.3	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Melakukan <i>Fraudulent Financial Reporting</i>	27
2.5.4	Pengaruh Perilaku tidak Etis Terhadap Kecenderungan Melakukan <i>Fraudulent Financial Reporting</i>	28
2.5.5	Pengaruh Kompetensi Terhadap Kecenderungan Melakukan <i>Fraudulent Financial Reporting</i>	29
2.5.6	Pengaruh Rangkap Jabatan Terhadap Kecenderungan Melakukan <i>fraudulent Financial Reporting</i>	30
BAB III	METODE PENELITIAN	31
3.1	Rancangan Penelitian	31
3.2	Lokasi Penelitian	31
3.3	Populasi dan Sampel	32
3.4	Jenis dan Sumber Data	32
3.5	Teknik Pengumpulan Data	33
3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	34
3.6.1	Variabel Independen (Bebas).....	34
3.6.2	Variabel Dependen (Terikat)	38
3.7	Analisis Data.....	38
3.7.1	Statistik Deskriptif	39
3.7.2	Uji Kualitas Data	39
3.7.2.1	Uji Validitas	40
3.7.2.1	Uji Reliabilitas	40
3.7.3	Uji Asumsi Klasik	40
3.7.3.1	Uji Normalitas	40
3.7.3.2	Uji Autokorelasi.....	41
3.7.3.3	Uji Heteroskedastisitas	42
3.7.3.4	Uji Multikolinearitas.....	42
3.7.4	Uji Hipotesis.....	43
3.7.5	Analisis Regresi Berganda	43
3.7.5.1	Uji Koefisien Determinasi (R ²)	44
3.7.5.2	Uji Simultan (Uji F).....	44
BAB IV	HASIL PENELITIAN	45
4.1	Deskripsi Data	45
4.2	Karakteristik Responden	46
4.2.1	Deskripsi karakteristik responden berdasarkan Jenis kelamin.....	46
4.2.2	Deskripsi karakteristik responden berdasarkan usia .	46

4.2.3 Deskripsi karakteristik responden berdasarkan Pendidikan terakhir.....	47
4.2.4 Deskripsi karakteristik responden Berdasarkan jabatan	48
4.2.5 Deskripsi karakteristik responden berdasarkan Organisasi perangkat daerah (OPD)	49
4.3 Analisis Deskriptif Pernyataan	50
4.3.1 Analisis Deskriptif Variabel Kepuasan Kompensasi	50
4.3.2 Analisis Deskriptif Variabel Gaya Kepemimpinan	52
4.3.3 Analisis Deskriptif Variabel Sistem Pengendalian Internal	53
4.3.4 Analisis Deskriptif Variabel Perilaku Tidak Etis	54
4.3.5 Analisis Deskriptif Variabel Kompetensi	55
4.3.6 Analisis Deskriptif Variabel Rangkap jabatan.....	56
4.3.7 Analisis Deskriptif Variabel <i>Fraudulent Financial reporting</i>	57
4.4 Hasil Uji Kualitas Data	59
4.4.1 Hasil Uji Validitas.....	59
4.4.2 Hasil uji Reliabilitas	61
4.5 Hasil uji Asumsi Klasik.....	62
4.5.1 Hasil Uji Normalitas	62
4.5.2 Hasil uji Multikolinearitas.....	64
4.5.3 Hasil Uji Heterokedastisitas	65
4.6 Hasil Pengujian Hipotesis	66
4.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda.....	66
4.6.2 Hasil uji Parsial (Uji T)	67
4.6.3 Hasil uji Signifikansi Simultan (F).....	70
4.6.4 Koefisien Determinasi (R^2)	71
4.7 Pembahasan hasil penelitian.....	72
4.7.1 Pengaruh Kepuasan Kompesasi Terhadap Kecenderungan melakukan <i>Fraudulent Financial Reporting</i>	72
4.7.2 Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kencendurangan melakukan <i>Fraudulent Financial Reporting</i>	74
4.7.3 Pengaruh Sistem pengendalian Internal Terhadap Kencendurangan melakukan <i>Fraudulent Financial Reporting</i>	75
4.7.2 Pengaruh Perilaku tidak Etis Terhadap Kencendurangan melakukan <i>Fraudulent Financial Reporting</i>	77
4.7.2 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kencendurangan melakukan <i>Fraudulent Financial Reporting</i>	78
4.7.2 Pengaruh Rangkap Jabatan Terhadap	

	Kecenderungan melakukan <i>Fraudulent Financial Reporting</i>	80
BAB V	PENUTUP	82
	5.1 Kesimpulan	82
	5.2 Keterbatasan Penelitian.....	84
	5.3 Saran.....	84
	DAFTAR PUSTAKA	86
	LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Praktik-praktik <i>fraud</i> yang terjadi di tahun 2019	4
Tabel 3.1 Pengukuran Skala <i>Likert</i>	31
Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan data	45
Tabel 4.2 Deskripsi Variabel Kesesuaian Kompensasi (X1)	51
Tabel 4.3 Deskripsi Variabel Gaya Kepemimpinan (X2)	52
Tabel 4.4 Deskripsi Variabel Sistem Pengendalian Internal (X3).....	53
Tabel 4.5 Deskripsi Variabel Perilaku tidak Etis (X4)	55
Tabel 4.6 Deskripsi Variabel Kompetensi (X5)	56
Tabel 4.7 Deskripsi Variabel Rangkap Jabatan (X6).....	57
Tabel 4.8 Deskripsi Variabel <i>Fraudulent Financial Reporting</i> (Y).....	58
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas	60
Table 4.10 Hasil Uji Reliabilitas	62
Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas Menggunakan <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	64
Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinearitas	65
Tabel 4.13 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	67
Tabel 4.14 Hasil Uji Statistik T.....	68
Tabel 4.15 Hasil Uji Simultan (Uji F)	71
Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	72
Tabel 4.17 Hasil Pengujian Hipoteses	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Fraud Pentagon Model</i>	18
Gambar 2.2 Kerangka pemikiran teoritis.....	24
Gambar 4.1 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin	46
Gambar 4.2 Karakteristik responden berdasarkan usia	47
Gambar 4.3 Karakteristik responden berdasarkan Pendidikan terakhir.....	48
Gambar 4.4 Karakteristik responden berdasarkan jabatan	49
Gambar 4.5 Karakteristik responden berdasarkan OPD	50
Gambar 4.6 Hasil Uji Normalitas	63
Gambar 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Grafik <i>scatterplot</i>	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata.....	91
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian	92
Lampiran 3 Rekapitulasi Jawaban Responden.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Fraud masih menjadi masalah yang hingga saat ini masih terus terjadi yang menyebabkan tidak efektifnya proses pembangunan ataupun perkembangan suatu instansi baik itu pada perusahaan privat maupun publik. Hall (2007:135) mendefinisikan *fraud* sebagai kebohongan yang disengaja, ketidakbenaran dalam melaporkan aktiva perusahaan atau manipulasi data keuangan bagi keuntungan pihak yang melakukan manipulasi tersebut. *Fraud* telah menjadi musuh bersama Lembaga anti-korupsi di dunia, sehingga telah banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sebab-sebab dari tindakan yang merugikan ini. *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFA) mengklasifikasikan *fraud* dalam beberapa klasifikasi dan dikenal dengan istilah "*Fraud Tree*" yaitu *asset misappropriation* (penyimpangan atas aset), *fraudulent financial statement* (kecurangan laporan keuangan) dan *corruption* (korupsi). Banyak para ahli yang mencoba untuk mendefinisikan *fraud* yang jika dilihat dari struktur bahasa dan cara penyampaian berbeda namun pada hakekatnya mempunyai makna yang sama, hingga munculnya teori-teori yang menjadi dasar seseorang untuk melakukan *fraud* pun terus berkembang, mulai dari *triangle fraud theory* yang dikembangkan oleh Cressey (1953), *GONE Theory* oleh Bologna (1993), *diamond fraud theory* yang dipopulerkan oleh Wolfe dan Hermanson (2004) hingga *pentagon fraud theory* yang dikembangkan oleh Crowe Howart (2011).

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis lebih dalam mengenai penyebab terjadinya *fraud*. Dimulai dengan penelitian yang menggunakan pendekatan *fraud triangle theory* hingga pendekatan teori *fraud*

yang paling baru yakni *fraud pentagon theory*. Penelitian yang menggunakan pendekatan *fraud pentagon theory* salah satunya yaitu Helda (2018) yang menguji *fraudulent financial reporting* pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2011-2015. Penelitian lain yang menggunakan pendekatan yang sama yakni penelitian yang dilakukan oleh Apriliana (2017) yang meneliti khusus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada bursa efek Indonesia, beberapa proksi yang digunakan untuk mengukur variabel pada penelitian Apriliana sama dengan yang digunakan oleh penelitian Helda kecuali pada *pressure* yang menggunakan *liquidity* dan menghilangkan *external pressure*. Triyanto (2019) yang juga menggunakan pendekatan *fraud pentagon theory* namun terdapat perbedaan pada proksi *pressure* yang hanya menggunakan *financial target*, kemudian *opportunity* yang hanya menggunakan *account receivable ratio*. Dari tiga penelitian tersebut, *financial stability*, *quality of external auditor*, dan *frequent number of CEO* adalah proksi yang positif memiliki pengaruh terhadap terjadinya *fraudulent financial reporting*, sementara proksi lainnya tidak begitu berpengaruh terhadap terjadinya *fraudulent financial reporting*. Sementara pada sektor publik atau pemerintahan Prambudi, dkk (2017) melakukan penelitian pada kementerian perdagangan dengan menggunakan pendekatan *fraud pentagon* dengan memproksikan elemen-elemen yang ada dengan keadilan prosedural, sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, budaya organisasi, perilaku tidak etis, dan penegakan hukum.

Praktik *fraud* bukan menjadi hal yang baru lagi bagi masyarakat. Tentunya kerugian yang di akibatkan oleh *fraud* tidak bisa disepelekan apalagi apabila telah masuk ke sektor publik yakni pemerintahan. Praktik *fraud* yang berkaitan dengan laporan keuangan dikenal dengan istilah *fraudulent financial reporting*. Arens (2012: 336) mendefinisikan *fraudulent financial reporting* dengan “*Fraudulent*

financial reporting is an intentional misstatement or omission of amounts or disclosures with the intent to deceive users". Pengertian yang dimaksud tersebut yaitu salah saji yang disengaja, kelalaian yang dimaksudkan untuk mengelabui pengguna laporan keuangan.

Praktik kecurangan seperti *fraudulent financial reporting* ataupun jenis *fraud* dari tahun ke tahun masih mengalami trend yang fluktuatif dan belum memberikan tanda trend menurun (ICW, 2019). Dari data yang dikeluarkan oleh Indonesian Corruption Watch tahun 2018, ada 454 kasus korupsi dengan kerugian mencapai 5,6 Triliun dan ada 1087 tersangka yang terlibat dari berbagai elemen, sektor paling tinggi yang mengalami korupsi adalah dana desa (ICW, 2018). Sementara itu di tahun 2019 dari laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Indonesian Corruption Watch, jumlah kasus korupsi mengalami penurunan ke angka 271 kasus dengan 580 pelaku namun jumlah kerugian negara melebihi angka di tahun 2018 yaitu sebesar 8,4 Triliun (ICW, 2019).

Salah satu kasus yang baru saja mencuat di publik akhir tahun 2019 adalah kasus dari salah satu BUMN yaitu perusahaan Jiwasraya dengan kerugian negara di taksir hingga Rp 13,7 Triliun. Bahkan laporan yang disampaikan oleh BPK (Merdeka 1/8) sudah sejak 2006 laporan keuangan Jiwasraya bermasalah dimana laba yang disajikan di laporan keuangan adalah laba fiktif, dalam hal ini laba tersebut merupakan laba semu karena rekayasa akuntansi (Merdeka.com, 2020). Lebih lanjut, di tahun 2017, Jiwasraya masih melaporkan laba ke publik sebesar Rp 360,6 Miliar. Namun laba tersebut mendapatkan opini kurang wajar dikarenakan ada kekurangan pencadangan dengan jumlah Rp 7,7 Triliun. Tak sampai disana, di tahun 2018 BPK juga mengungkapkan kerugian sebesar Rp 15,3 Triliun oleh Jiwasraya yang berakibat hingga November 2019 yang memiliki *negative equity* sebesar Rp 27,2 Triliun. Sejak tahun 2015 hasil penjualan produk

saving plan di investasikan ke perusahaan yang kinerjanya tidak begitu bagus yang berakibat kepada gagal bayar (Makki, 2020).

Menurut survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) pada tahun 2014, sektor keuangan dan perbankan merupakan sektor yang paling banyak mengalami kasus *fraud* diikuti oleh pemerintahan dan administrasi publik (Herviana, 2017: 5). Di pemerintahan Indonesia khususnya, praktik *fraud* seolah bukan hal yang baru lagi, selama periode 2001 – 2012 ada 1842 koruptor dengan nilai kerugian eksplisit mencapai Rp 168 Triliun (aclc.kpk.go.id), dan selama periode 2015 – 2019 ada 2333 kasus korupsi yang melibatkan 5910 tersangka yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 19,9 Triliun diluar kerugian eksplisit yang diakibatkannya (ICW, 2019). Dari kedua data tersebut dapat kita bandingkan dan lihat bahwa kasus yang terjadi pada rentan waktu 2001-2012 dan 2015 – 2019 sangat berbeda dan memiliki tren kenaikan yang cukup signifikan dari segi kasus dan pelaku padahal rentan waktunya sangat berbeda.

Sektor pemerintahan menjadi sektor yang sangat rentan mengalami penyelewangan dan atau *fraud* merujuk data yang dikemukakan oleh *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) pada tahun 2014. Hal ini sejalan dengan hasil yang dikeluarkan oleh *Indonesian Corruption Watch*, di tahun 2018 anggaran pemerintahan dan dana desa menjadi yang paling tinggi tingkat korupsinya dan di tahun 2019-pun keadaan yang sama tetap terjadi. Apabila kita melihat lebih jauh ketataran daerah, Provinsi Sulawesi selatan masuk dalam kategori yang rentan terjadi *fraud*, di tahun 2018 saja Provinsi Sulawesi-selatan berada di peringkat ketiga jumlah kasus terbanyak di Indonesia dengan jumlah kasus 31 dengan tersangka 62 orang dan kerugian negara mencapai Rp 74,5 Miliar, hanya kalah dari provinsi Jawa timur dan Jawa Tengah di posisi pertama dan kedua. Praktik

praktik kecurangan yang muncul yang paling dominan ditahun 2019 adalah suap sebanyak 51 kasus dengan nominal Rp 215,5 Miliar, kemudian diikuti oleh *Mark up* sebanyak 41 kasus dengan nominal Rp 172,3 miliar, Penyalahgunaan anggaran sebanyak 39 kasus dengan nominal kerugian sebesar Rp 1,4 Triliun, dan beberapa praktik-praktik lainnya seperti yang ditampilkan ditabel dibawah:

Tabel 1.1 **Praktik-praktik *fraud* yang terjadi di tahun 2019**

No	Keterangan	Jumlah	Nilai KN	Nilai Suap	Nilai Pungli	Nilai Pencucian Uang
1.	Suap	51	-	Rp169,5 miliar	-	Rp46 miliar
2.	Mark up	41	Rp172,3 miliar	-	-	Rp11 miliar
3.	Penyalahgunaan anggaran	39	Rp1,4 triliun	-	-	-
4.	Penggelapan	35	Rp71 miliar	-	-	-
5.	Penyalahgunaan wewenang	30	Rp6,3 triliun	-	-	-
6.	Kegiatan/proyek fiktif	22	Rp257,9 miliar	-	-	-
7.	Laporan fiktif	22	Rp113,6 miliar	-	-	-
8.	Pungutan liar	11	-	-	Rp1 miliar	-
9.	Gratifikasi	7	-	Rp31,2 miliar	-	Rp51 miliar
10.	Pemerasan	7	-	Rp100 juta	Rp2,7 miliar	-
11.	Penyunatan/Pemotongan	5	Rp5,4 miliar	-	-	-
12.	Mark down	1	Rp680 juta	-	-	-

Sumber : Indonesian Corruption Watch, “*trend penindakan kasus korupsi tahun 2019*”

Perbedaan paling mendasar yang terjadi pada penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah objek penelitian, dimana peneliti memilih sektor pemerintahan yaitu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai objeknya. Pemerintahan dipilih karena *fraud* yang terjadi pada sektor pemerintahan memiliki dampak besar kepada masyarakat dibanding *fraud* yang terjadi pada sektor privat yang sifatnya hanya merugikan para investor, *fraud* yg terjadi di pemerintahan akan memperlambat proses pembangunan karena dana yang ada tidak tersalurkan ke masyarakat baik itu pembangunan infrastruktur ataupun jenis pembangunan atau bantuan lainnya. Pada penelitian ini, pendekatan teori yang digunakan yaitu *fraud pentagon theory* untuk menguji *fraudulent financial reporting*. *Fraud pentagon theory* yang dikembangkan oleh Crowe (2011) memiliki

kelebihan karena merupakan teori terbaru dengan lima elemen yang mendasari seseorang melakukan *fraud*.

Hingga saat ini masih sedikit penelitian yang mencoba mengkaji *fraudulent financial reporting* pada pemerintahan khususnya menggunakan pendekatan *fraud pentagon theory*, sehingga peneliti memilih menggunakan *fraud pentagon theory* demi menguji faktor dari elemen teori tersebut. Elemen – elemen dalam *pentagon fraud theory* juga tidak begitu saja diteliti maka dari itu dibutuhkan proksi untuk mengukur ketepatan hasil penelitian. Proksi yang digunakan pada unsur tekanan (*pressure*) menggunakan kepuasan kompensasi dan gaya kepemimpinan, untuk unsur kesempatan (*opportunity*) diproksikan dengan sistem pengendalian internal, pada rasionalisasi (*rationalization*) penelitian ini diproksikan dengan perilaku tidak etis, untuk kompetensi (*competence*) tetap diproksikan dengan kompetensi, dan arogansi (*arrogance*) diproksikan dengan rangkap jabatan. Proksi-proksi tersebut dipilih karena dianggap paling mendekati permasalahan yang diangkat oleh peneliti pada pemerintahan sesuai dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Adapun judul yang diangkat pada penelitian ini yaitu **"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraudulent Financial Reporting*: Perspektif *Fraud Pentagon Theory* (Studi Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan)".**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang melatar belakangi penelitian ini, maka rumusan masalah akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepuasan kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan *fraudulent financial reporting* di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan?

2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kecenderungan *fraudulent financial reporting* di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan *fraudulent financial reporting* di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan?
4. Apakah perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecenderungan *fraudulent financial reporting* di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan?
5. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kecenderungan *fraudulent financial reporting* di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan?
6. Apakah rangkap jabatan berpengaruh terhadap kecenderungan *fraudulent financial reporting* di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui apakah kepuasan kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan *fraudulent financial reporting* di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kecenderungan *fraudulent financial reporting* di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
3. Untuk mengetahui Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan *fraudulent financial reporting* di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Untuk mengetahui apakah perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecenderungan *fraudulent financial reporting* di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

5. Untuk mengetahui apakah kompetensi berpengaruh terhadap kecenderungan *fraudulent financial reporting* di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
6. Untuk mengetahui apakah rangkap jabatan berpengaruh terhadap kecenderungan *fraudulent financial reporting* di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak terkait. Diantara kegunaan tersebut antara lain

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi sebuah sarana untuk melihat dan memberikan pandangan kepada pimpinan ataupun pihak yang berwenang didalam pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat sehingga dapat menghindari kerugian akibat dari praktik *fraudulent financial reporting*. Selain itu diharapkan setiap karyawan ataupun segala pihak didalam entitas saling mengingatkan untuk menjauhi perilaku kecurangan (*fraud*).

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih jauh kepada masyarakat bahwa fenomena *fraud* sering terjadi didalam pemerintahan dan agar supaya masyarakat dapat berkontribusi untuk mendeteksi dan mencegah sedini mungkin adanya praktik *fraudulent financial reporting*.

3. Bagi literatur

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang Audit sektor publik terkait praktik kecurangan pelaporan keuangan di Lembaga pemerintahan

4. Bagi pihak lain

Peneilitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya sehingga ada perbaikan yang lebih baik kepada kasus kasus yang sejenis yang kerap kali terjadi.

1.5 Sistematika Penelitian

Skripsi ini direncanakan akan terdiri dari lima bab, dimana tiap-tiap bab akan berisi pembahasan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan teori-teori yang mendukung penelitian ini dan menjadi acuan dasar teori yang digunakan untuk mengolah data yang ada, serta penelitian penelitian terdahulu

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisis data, dan interpretasi terhdap hasil berdasarkan atas data dat yang telah diolah selama penelitian berlangsung

BAB V PENUTUP

Bab ini akan disajikan kesimpulan serta saran terkait dengan pembahasan dan permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Fraud Pentagon Theory*

Fraud pentagon theory pertama kali di kemukakan oleh Crowe Howart pada tahun 2011. Teori ini menyempurnakan beberapa teori mengenai *fraud* yang berkembang sebelumnya, yaitu *fraud triangle theory* oleh Cressey (1993) dan *fraud diamond theory* oleh Wolf dan Hermanson (2004) dengan menambahkan dua elemen yakni Kompetensi (*Competence*) dan Arogansi (*arrogance*). Menurut Marks (2010) dua elemen tambahan pada teori *pentagon* ini ditambahkan mengingat para pelaku *fraud* pada masa sekarang dianggap memiliki pola pikir lebih independent, informasi yang lebih memadai dan akses yang lebih leluasa terhadap aset di perusahaan disbanding dengan pelaku *fraud* pada saat *triangle fraud theory* diperkenalkan pertama kali. Lebih lanjut, Marks (2010) menyebutkan bahwa perusahaan saat ini memiliki budaya yang mengendepankan kesejahteraan dan kepopuleran, yang mendorong karyawan untuk memperoleh gaji yang lebih dan pengakuan besar dengan cara apapun.

Teori *fraud* yang pertama kali berkembang adalah teori yang di kemukakan oleh Donald R. Cressey (1953). Cressey (1953) menjelaskan bahwa elemen elemen yang mendasari seseorang melakukan *fraud* sesuai dengan teori *fraud triangle*, yaitu tekanan (*pressure*) adalah motivasi dari diri individu karyawan untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) dikarenakan adanya tekanan baik keuangan dan nonkeuangan dari pribadi maupun tekanan dari organisasi . Elemen kedua yaitu kesempatan (*opportunity*) yaitu kondisi dimana seseorang terdorong melakukan kecurangan karena adanya kelemahan sistem. Oleh karena itu, organisasi perlu membangun sebuah pengendalian atau pengawasan yang baik

sehingga karyawan tidak dapat melakukan kecurangan. Elemen terakhir pada *triangle fraud* yaitu rasionalisasi (*rationalization*) yang merupakan sikap atau proses berfikir dengan pertimbangan moral dan individu karyawan untuk merasionalkan tindakan kecurangan.

Teori *fraud* yang berkembang setelah *fraud triangle* adalah *fraud diamond* yang dikembangkan oleh Wolfe dan Hermanson pada tahun 2004. Teori ini merupakan pengembangan dari *fraud triangle theory* dengan penambahan satu unsur yaitu kemampuan (*capability*) yang memiliki dorongan signifikan terhadap kecurangan. Wolfe dan Hermanson (2004) berpendapat bahwa:

“Many Frauds, especially some of the multibillion-dollar ones, would not have occurred without the right person with the right capabilities in place. Opportunity opens the doorway to fraud, and incentive and rationalization can draw the person toward it. But the person must have the capability to recognize the open doorway as an opportunity and to take advantage of it by walking through, not just once, but time and time again. Accordingly, the critical question is, Who could turn an opportunity for fraud into reality?”

Artinya, “Banyak kecurangan-kecurangan yang khususnya bernominal milyaran dolar mungkin tidak akan terjadi apabila tidak ada orang tertentu dengan kapabilitas tertentu yang ada dalam perusahaan. Peluang membuka pintu masuk untuk kecurangan dan tekanan dan rasionalisasi yang mendorong seseorang untuk melakukan hal tersebut. Tetapi seseorang tersebut harus memiliki kapabilitas untuk mengenali pintu yang terbuka sebagai peluang dan mengambil keuntungan apa yang dijalannya bukan hanya sekali tetapi berkali-kali. Berdasarkan hal tersebut pertanyaan kritik yang diajukan adalah siapa yang bisa mengubah peluang untuk kecurangan menjadi kenyataan?”.

Sehingga dapat dikatakan bahwa kecurangan tidak akan terjadi tanpa adanya orang yang mampu untuk melakukan kecurangan. Adapun sifat-sifat yang terkait elemen kemampuan (*capability*) dalam tindakan pelaku kecurangan yaitu:

Position / function, brains, confidence / ego, coercion skills, effective lying, immunity to stress (Wolfe dan Hermanson, 2004).

Teori terakhir yang berkembang tentang faktor-faktor penyebab terjadinya *fraud* adalah *fraud pentagon theory* (Crowe, 2011) yang merupakan teori yang digunakan didalam penelitian ini. Tambahan pengembangan dari teori sebelumnya yaitu arogansi (*arrogance*). Kompetensi (Competence) dalam *fraud pentagon theory* memiliki pengertian yang serupa dengan kapasitas (*capability*) pada *diamond fraud theory*, dimana kondisi ini mendorong seseorang melakukan kecurangan berdasarkan kemampuan yang dimiliki untuk melanggar pengendalian internal, mengembangkan strategi dan mengendalikan situasi sosial untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, arogansi (*arrogance*) yang juga menjadi salah satu elemen dari *pentagon fraud theory* merupakan sebuah kondisi yang berkaitan dengan sikap pribadi yang berlebihan terhadap hak milik dimana kebijakan perusahaan atau kontrol internal tidak berlaku bagi dirinya. Arogansi yang tinggi menimbulkan terjadinya *fraud* karena dengan arogansi dan superioritas yang dimiliki seseorang pimpinan membuatnya merasa bahwa *internal control* apapun tidak berlaku bagi dirinya disebabkan oleh status dan posisinya. Menurut Crowe (2011), Juga terdapat kemungkinan bahwa pimpinan akan melakukan cara apapun untuk mempertahankan posisi dan kedudukan yang sekarang dimiliki (Chyntia, 2016). Berikut dijelaskan mengenai elemen elemen yang terdapat pada *fraud pentagon theory* secara lebih mendalam.

2.1.1 Pressure

Cressey (1953) mengemukakan bahwa tekanan (*pressure*) adalah motivasi dari diri individu karyawan untuk melakukan tindakan kecurangan dikarenakan adanya tekanan baik keuangan maupun non-keuangan dari pribadi

maupun tekanan dari organisasi. Ana (2014) juga menjelaskan kondisi ini dengan pihak manajemen sebagai agen yang harus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil yang baik kepada pihak pemegang saham dalam bentuk laba yang meningkat setiap tahunnya dapat dikategorikan sebagai tekanan yang dialami, walaupun perusahaan dalam kondisi mengalami kesulitan keuangan mereka dituntut untuk tetap memiliki kinerja yang baik. Adapun faktor-faktor yang dapat meningkatkan tekanan antara lain yaitu (1) masalah keuangan seperti hutang, biaya kesehatan yang besar dan kebutuhan tak terduga, serta (2) masalah non-keuangan yaitu sifat buruk seperti berjudi, peminum, pemakai narkoba, dan lain sebagainya. Sementara menurut SAS No.99, terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada tekanan yang dapat mengakibatkan kecurangan, yaitu *financial stability*, *external pressure*, *personal financial need*, dan *financial targets*.

2.1.2 Opportunity

Peluang (*Opportunity*) merupakan kondisi dimana seseorang didorong untuk melakukan kecurangan karena adanya tekanan. Menurut Ratmono *et.al* (2014) kesempatan akan timbul saat sistem pengendalian internal perusahaan melemah. Perusahaan dengan pengendalian internal yang lemah akan memiliki banyak celah yang menjadikan kesempatan bagi manajemen untuk memanipulasi transaksi. Adapun faktor-faktor yang dapat meningkatkan adanya peluang untuk melakukan kecurangan diantaranya adalah (1) sistem pengendalian internal yang lemah, (2) Tidak mampu menilai kualitas kerja karena tidak mempunyai alat atau kriteri pengukur kinerja yang sebenarnya, (3) kurang atau tidak adanya akses terhadap informasi sehingga tidak memahami keadaan yang sebenarnya, (4) Lalai, apatis, dan acuh tak acuh. Sementara menurut SAS No.99 terdapat beberapa kondisi terkait dengan kesempatan yang mengakibatkan seseorang untuk

melakukan kecurangan yaitu: *nature of industry*, *ineffective of monitoring*, dan struktur organisasional. Selain itu, kondisi lain yang menyebabkan adanya peluang untuk melakukan kecurangan yaitu lemahnya *internal control* yang ada didalam suatu entitas.

2.1.3 Rationalization

Rasionalisasi (*Rationalization*) merupakan kondisi dimana adanya beberapa karakter yang tidak etis sehingga mendorong pihak-pihak berkepentingan untuk melakukan kecurangan. Sehubungan dengan itu, Ana (2014) menyatakan *rationalization* sebagai kondisi dimana setiap perbuatan curang yang mereka lakukan dianggap sebagai tindakan yang wajar atau malah benar adanya karena tindakan curang yang seperti itu sudah jamak dilakukan oleh pihak manajemen diberbagai perusahaan diseluruh dunia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang mencari pembenaran atas tindakan kecurangan yang ia lakukan, antara lain adalah (1) mencontoh tindakan atasan atau rekan kerja, (2) merasa sudah berbuat banyak kepada organisasi, (3) menganggap bahwa yang diambil tidak seberapa, (4) dianggap hanya sekedar meminjam dan akan dikembalikan. Sementara itu menurut SAS No.99 rasionalisasi pada perusahaan dapat diukur dengan siklus pergantian auditor, opini audit yang didapat perusahaan tersebut serta keadaan total akrual dibagi dengan total aktiva.

Albrecht *et.al* (2011) menguraikan beberapa rasionalisasi yang sering terjadi, diantaranya:

- 1) Aset itu sebenarnya milik saya (*perpetrator's fraud*).
- 2) Saya hanya meminjam dan akan membayarnya kembali.
- 3) Tidak ada pihak yang dirugikan.
- 4) Ini dilakukan untuk sesuatu yang mendesak.

- 5) Kami akan memperbaiki pembukuan setelah masalah keuangan ini selesai.

2.1.4 Competence

Kompetensi (*competence*) adalah kemampuan karyawan untuk mengesampingkan pengendalian internal, dengan mengembangkan strategi penyimpangan yang canggih dan untuk mengendalikan situasi sosialnya demi keuntungannya dengan cara menjualnya kepada orang lain. Marks (2012) mengartikan kompetensi sebagai kemampuan pelaku kecurangan untuk menembus pengendalian internal yang ada di perusahaannya, mengembangkan strategi penggelapan yang canggih dan mampu mengendalikan situasi social yang mampu mendatangkan keuntungan baginya dengan cara memengaruhi orang lain agar bekerjasama dengannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kecurangan tidak akan terjadi tanpa adanya orang yang mampu untuk melakukan kecurangan. Adapun sifat-sifat yang terkait elemen kemampuan (*capability*) dalam tindakan pelaku kecurangan yaitu: *Position / function, brains, confidence / ego, coercion skills, effective lying, immunity to stress* (Wolfe dan Hermanson, 2004)

Adapun sifat-sifat seseorang yang memiliki kapasitas (*capability*) untuk melakukan kecurangan (*fraud*) menurut Wolfe dan Hermanson (2004), yaitu:

1. *Positioning*

Posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk penipuan. Seseorang dalam posisi otoritas memiliki pengaruh lebih besar atas situasi tertentu atau lingkungan.

2. *Intelligence and creativity*

Pelaku kecurangan ini memiliki pemahaman yang cukup dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dan untuk menggunakan posisi, fungsi, atau akses berwenang untuk keuntungan terbesar.

3. *Convidence / Ego*

Individu harus memiliki ego yang kuat dan keyakinan yang besar dia tidak akan terdeteksi. Tipe kepribadian umum termasuk seseorang yang didorong untuk berhasil di semua biaya, egois, percaya diri, dan sering mencintai diri sendiri (narsisme). Menurut *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*, gangguan kepribadian narsisme meliputi kebutuhan untuk dikagumi dan kurangnya empati untuk orang lain. Individu dengan gangguan ini percaya bahwa mereka lebih unggul dan cenderung ingin memperlihatkan prestasi dan kemampuan mereka.

4. *Coercion*

Pelaku kecurangan dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan penipuan. Seseorang individu dengan kepribadian yang persuasif dapat lebih berhasil meyakinkan orang lain untuk pergi bersama dengan penipuan atau melihat kearah lain.

5. *Deceit*

Penipuan yang sukses membutuhkan kebohongan efektif dan konsisten. Untuk menghindari deteksi, individu harus mampu berbohong meyakinkan, dan harus melacak cerita secara keseluruhan.

6. *Stress*

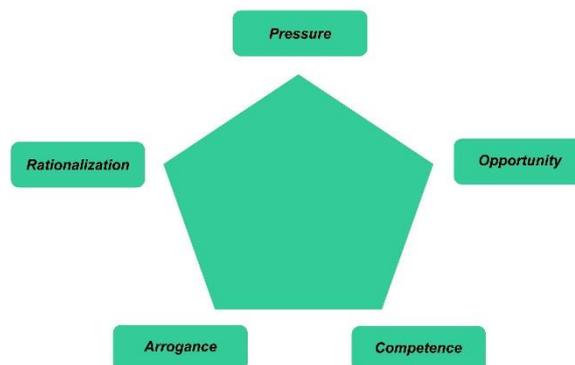
Individu yang harus mampu mengendalikan stres karena melakukan tindakan kecurangan dan menjaganya agar tetap tersembunyi sangat bisa menimbulkan *stress*.

2.1.5 Arrogance

Menurut Crowe (2011) , arogansi adalah sikap superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa control internal atau kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya. Marks (2012) mengemukakan bahwa arogansi (*Arrogance*) di identifikasikan sebagai sikap superioritas dan merasa berhak atau keserakahan sebagai bagian dari seseorang yang percaya bahwa pengendalian internal tidak berlaku terhadap pribadinya. Tingkat arogansi yang tinggi dapat menimbulkan terjadinya *fraud* karena dengan arogansi dan superioritas yang dimiliki membuat pimpinan merasa memegang penuh kontrol internal sehingga menganggap apapun tidak akan berlaku bagi dirinya dengan status yang dimiliki sabagai pimpinan. Howart (2011) mengemukakan bahwa ada lima elemen dari arogansi dari perspektif CEO, sebagai berikut:

1. Ego yang besar – CEO terlihat seperti selebriti daripada seorang pengusaha
2. Mereka menganggap pengendalian internal tidak berlaku untuk dirinya
3. Memiliki karakteristik perilaku pengganggu
4. Memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter
5. Memiliki ketakutan akan kehilangan posisi dan status

Apabila digambarkan maka *fraud pentagon theory* akan Nampak seperti gambar dibawah ini:



Gambar 2.1 *Fraud Pentagon Model*

2.2 Kecurangan (*Fraud*)

2.2.1 Definisi *Fraud*

Menurut hukum, *fraud* atau kecurangan/penipuan adalah tindakan yang sengaja dilakukan secara tidak adil dan merugikan pihak lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (Helda, 2018).

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2010), *fraud* adalah tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas.

Sedangkan Menurut Kennedy (2014) *fraud* merupakan suatu perbuatan dan tindakan yang dilakukan secara sengaja, sadar, tahu dan mau untuk menyalahgunakan segala sesuatu yang dimiliki secara bersama, misalnya: sumber daya perusahaan dan negara demi kenikmatan pribadi dan kemudian menyajikan informasi yang salah untuk menutupi penyalahgunaan tersebut. Penelitian juga dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2010) yang mengemukakan bahwa kasus *fraud* banyak dilakukan oleh dewan direksi atau pemilik perusahaan, yakni sebesar 83%. Selain itu, Ernest & Young (2009) juga menemukan bahwa lebih dari setengah pelaku *fraud* adalah manajemen.

Lebih lanjut, Badan Pemeriksa Keuangan (2008) telah mengemukakan unsur-unsur kecurangan (*fraud*) secara umum, di antaranya yaitu:

1. Harus terdapat salah pernyataan (*misrepresentation*);
2. Dari suatu masa lampau (*past*) atau sekarang (*present*);
3. Fakta bersifat material (*material fact*);
4. Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (*make-knowingly or recklessly*);

5. Dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi;
6. Pihak yang dirugikan harus beraksi (*acted*) terhadap salah pernyataan tersebut (*misrepresentation*);
7. Yang merugikannya (*detriment*).

2.2.2 Jenis-jenis *Fraud*

Dari beberapa pengertian *fraud* yang telah di bahas sebelumnya maka dapat diketahui bahwa *fraud* memiliki cakupan yang cukup luas sehingga diperlukan pengkategorian dalam hal ini. Sehubungan dengan hal tersebut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* membagi tiga kategori *fraud* yakni:

2.2.2.1 *Asset Misappropriation*

Penyimpangan ini meliputi penyalahgunaan Harta/aset perusahaan atau pihak lain. *Asset misappropriation* atau Penggelapan aset ini bersifat dapat dihitung atau tangible sehingga kecurangan (*fraud*) yang ada di dalamnya dapat lebih mudah terdeteksi.

2.2.2.2 *Corruption*

Korupsi merupakan *fraud* yang tidak hanya dilakukan satu orang saja tapi juga melibatkan banyak orang, sehingga korupsi menjadi kategori *fraud* yang paling sulit dideteksi. Adapun korupsi yang dimaksud dapat meliputi penyalahgunaan wewenang, penyuapan, penerimaan gratifikasi, dan pemerasan secara ekonomis.

2.2.2.3 *Fraudulent Financial Reporting*

Auditing and Assurance Services (Arens, et al, 2012: 336) mendefinisikan kecurangan pelaporan keuangan sebagai berikut:

“Fraudulent financial reporting is an intentional misstatement or omission of amounts or disclosures wuth the intent to deceive users”

Yang dapat diartikan sebagai salah saji yang disengaja, kelalaian dari jumlah atau pengungkapan dengan maksud untuk menipu pengguna laporan keuangan (Cynthia, 2016)

Menurut *Australian Auditing Standards (AAS)*, *fraudulent financial reporting* merupakan suatu kelalaian maupun penyalahsajian yang disengaja dalam jumlah tertentu atau pengungkapan dalam pelaporan keuangan untuk menipu para pengguna laporan keuangan (Brennan dan McGrath, 2007).

Beberapa sumber di atas memiliki sudut pandang yang sama dalam pendefinisian. Pelaporan keuangan yang mengandung unsur kecurangan dapat memengaruhi berbagai pihak dan kredibilitas informasi keuangan. Selain investor dan kreditor, auditor adalah salah satu korban *fraudulent financial reporting* karena mereka mungkin menderita kerugian keuangan dan/atau kehilangan reputasi (Rezaee, 2002).

2.2.3 Pelaku *Fraudulent Financial Reporting*

Fraudulent financial statement dilakukan oleh siapa saja pada level apapun, siapapun yang memiliki kesempatan (Nguyen dan Pontell, 2008). Sehubungan dengan hal tersebut Taylor (2004), mengelompokkan pelaku utama *fraudulent financial reporting* sebagai berikut:

- 1) Senior manajemen (CEO, CFO, dan lain-lain). CEO terlibat *fraud* pada tingkat 72%, sedangkan CFO pada tingkat 43 %. Karyawan tingkat menengah dan tingkat rendah.
- 2) Karyawan ini bertanggungjawab pada anak perusahaan, divisi, atau unit lain dan mereka dapat melakukan kecurangan pada laporan keuangan untuk melindungi kinerja mereka yang buruk atau untuk mendapatkan bonus berdasarkan hasil kinerja yang lebih tinggi.

2.2.4 Modus Terjadinya *Fraudulent Financial Reporting*

Fraudulent financial reporting merupakan kekeliruan yang disengaja dalam menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. Kekeliruan tersebut bersifat material sehingga dapat memengaruhi beberapa pihak berkepentingan dalam mengambil keputusan. Adapun modus yang dapat terjadi dalam penyajian laporan keuangan meliputi; manipulasi, pemalsuan, atau *alteration* catatan akuntansi atau dokumen pendukung dari laporan keuangan yang disusun tidak menyajikan kebenaran atau dengan sengaja menghilangkan kejadian, transaksi, dan informasi penting dari laporan keuangan dan dengan sengaja menerapkan prinsip akuntansi yang salah.

Lebih lanjut, Wells (2011) juga menguraikan beberapa modus terjadinya *Fraudulent financial reporting*, antara lain:

- 1) Pemalsuan, perubahan, atau manipulasi catatan keuangan (*financial record*), dokumen pendukung atau transaksi bisnis.
- 2) Penghilangan yang disengaja atas peristiwa, transaksi, akun, atau informasi signifikan lainnya sebagai sumber dari penyajian laporan keuangan.
- 3) Penerapan yang salah dan disengaja terhadap prinsip akuntansi, kebijakan, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur, mengakui, melaporkan dan mengungkapkan peristiwa ekonomi dan transaksi bisnis.
- 4) Penghilangan yang disengaja terhadap informasi yang seharusnya disajikan dan diungkapkan menyangkut prinsip dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam membuat laporan keuangan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang *fraudulent financial reporting* telah dilakukan oleh beberapa peneliti menggunakan pendekatan *fraud triangle*, *fraud diamond*,

maupun *fraud pentagon* baik itu meneliti di sektor privat maupun sektor publik. Penelitian yang dilaksanakan di pemerintahan yakni Afsari (2016) yang mencoba menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan *fraud* di sektor pemerintahan, yaitu kesesuaian kompensasi, gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal, penegakan peraturan, Budaya manajemen dan komitmen organisasi. Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan melakukan kecurangan/*fraud* sedangkan variabel selain itu tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian yang lain yaitu Wilopo (2006) yang meneliti terkait *fraud* dan perilaku tidak etis di BUMN *go public* dan BUMN *non-go public* yang ada di seluruh Indonesia. Hasil dari penelitian yang tersebut menunjukkan keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan moralitas manajemen berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan perilaku tidak etis. Semakin tinggi tingkat keefektifan pengendalian internal, semakin taatnya individu terhadap aturan akuntansi dan semakin baik moralitas manajemen maka kecenderungan untuk berbuat tidak etis dan melakukan kecurangan akan semakin rendah. Untuk kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan perilaku tidak etis. Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan perilaku tidak etis karena semakin tinggi tingkat asimetri informasi maka semakin tinggi pula individu untuk melakukan perilaku tidak etis itu sendiri terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dimana jika individu tersebut juga akan melakukan kecurangan akuntansi.

Dalam penelitian yang lain, Mustikasari (2013) yang meneliti tentang bagaimana persepsi pegawai dinas di Kabupaten Batang tentang faktor-faktor

yang mempengaruhi kecurangan (*fraud*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum, keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi keadilan prosedural, Budaya manajemen, komitmen manajemen berpengaruh negatif terhadap *fraud*, sedangkan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap *fraud*. Apabila penegakan hukum lemah maka akan membuka peluang bagi pegawai untuk melakukan tindak kecurangan.

Lebih lanjut, dalam penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2007) meneliti tentang pengaruh persepsi aparatur pemerintah tentang tindak kecurangan korupsi pada pemerintah daerah yang dilakukan di Provinsi DIY, khususnya di 8 (delapan) instansi. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan alat analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan secara partial kepuasan kompensasi dan Budaya organisasi berpengaruh terhadap persepsi aparatur pemerintah daerah tentang tindak pidana korupsi.

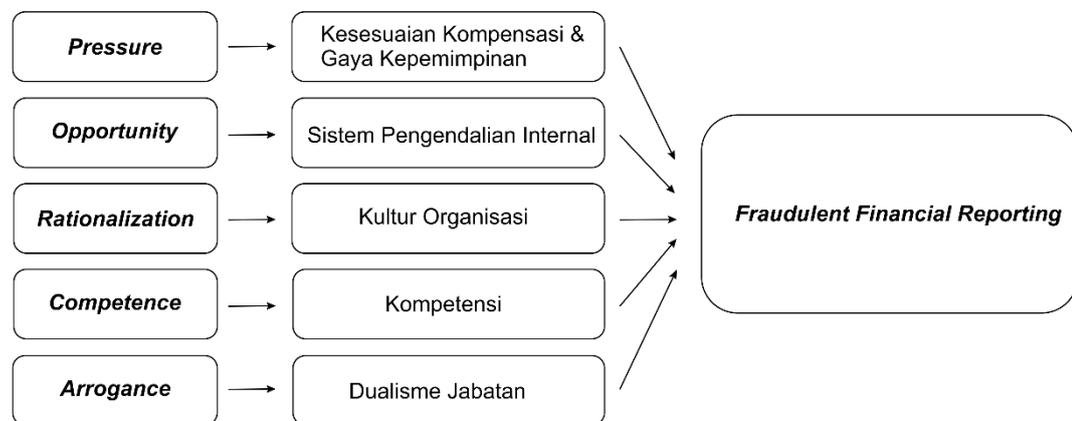
Najahningrum (2013) melakukan penelitian terhadap pegawai dinas provinsi DIY menggunakan variabel penegakan peraturan, sistem pengendalian internal, asimetri informasi, keadilan distributif, keadilan prosedural, komitmen organisasi, dan Budaya organisasi menggunakan *structural equation modelling* (SEM). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, keadilan distributif, keadilan prosedural dan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan melakukan tindakan kecurangan (*fraud*), sedangkan asimetri informasi memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan melakukan kecurangan di instansi pemerintahan.

Penelitian dengan konsep kecurangan juga dilakukan oleh Apriadi (2013) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* di institusi pemerintahan meliputi kesesuaian gaji, efektivitas

sistem pengendalian internal dan Budaya organisasi yang berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* di institusi pemerintahan yang menjadi objek penelitian.

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran Teoritis menggambarkan hubungan antara variabel-variabel pendeteksi *fraud* yaitu kepuasan kompensasi, sistem pengendalian internal, perilaku tidak etis, kompetensi, dan gaya kepemimpinan terhadap *fraudulent financial reporting* yang terjadi di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kerangka pemikiran ini didasarkan pada landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu mengenai *fraudulent financial reporting*.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.5 Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.5.1 Pengaruh Kepuasan Kompensasi Terhadap Kecenderungan Melakukan *Fraudulent Financial Reporting*

Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh suatu entitas kepada karyawan atau pegawainya, baik itu berupa finansial maupun non finansial sesuai dengan tingkat pekerjaan yang telah diselesaikan. Apabila kita mengaitkannya dengan teori *fraud pentagon*, tekanan dari faktor ekonomi dan keuangan menjadi faktor dari elemen *pressure*. Tekanan tersebut kemudian

menjadi pendorong untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan kompensasi lebih. Dengan sesuainya tingkat kompensasi yang diberikan oleh suatu pemerintah kepada pegawainya sesuai dengan posisi pekerjaan yang mereka kerjakan seharusnya dapat menekan tingkat terjadinya *fraud* di sektor pemerintah.

Dalam penelitian yang dilakukan Sulistiyowati (2007) bahwa kepuasan gaji berpengaruh terhadap persepsi aparatur pemerintah daerah tentang tindak korupsi. Terdapat kesesuaian hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain (2013) yang berarti bahwa semakin tinggi persepsi kesesuaian kompensasi pegawai instansi di pemerintahan maka dapat menekan tingkat terjadinya fraud di sektor pemerintahan. Hasil analisis ini mendukung teori yang ada, Darsono (2001) mengemukakan bahwa seseorang yang terpuaskan kompensasinya tidak akan melakukan tindakan korupsi, didukung dengan penelitian Pramudi dkk (2019) yang menunjukkan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap terjadinya fraud di institusi pemerintahan yang diteliti, artinya semakin tinggi kompensasi yang diterima pegawai maka kecenderungan mereka untuk melakukan *fraud* semakin kecil. Sementara menurut Ardianingsih (2016) terdapat pengaruh tidak signifikan antara kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan di sektor pemerintahan, dalam penelitian yang lain yang dilakukan oleh Adinda (2015) dan Sari (2016) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap fraud.

H₁: Terdapat Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Terhadap kecenderungan melakukan *fraudulent financial reporting*.

2.5.2 Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kecenderungan Melakukan *Fraudulent Financial Reporting*

Kepemimpinan atau *leadership* merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip dan rumusannya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia Moejiono (2002). Menurut Young pengertian kepemimpinan yaitu bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus.

Menurut COSO (2004), Lingkungan yang etis dari suatu organisasi meliputi aspek dari gaya top manajemen dalam mencapai sasaran organisatoris, nilai-nilai mereka dan gaya manajemen atau kepemimpinannya, didalam penelitian Rae and Subramaniam (2008), bahwa terdapat pengaruh antara lingkungan etis dengan prosedur *internal control* yang memoderasi adanya pengaruh antara keadilan organisasi terhadap kecurangan karyawan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramudita (2013) dimana gaya kepemimpinan berpengaruh negative terhadap kecenderungan melakukan *fraud* yang. Zulkarnain (2013) juga menemukan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap *fraud* disektor pemerintahan. Dari adanya penelitian tersebut, peneliti tertarik menguji kembali apakah masih ada pengaruh secara langsung antara gaya kepemimpinan terhadap terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan, dengan asumsi bahwa semakin baik gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi, akan semakin rendah tingkat terjadinya *fraud* dalam organisasi tersebut.

H₂: Terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kecenderungan melakukan *fraudulent financial reporting*.

2.5.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Melakukan *Fraudulent Financial Reporting*

Pengendalian internal berkaitan dengan proses-proses dan praktik manajemen suatu organisasi dimana pimpinan organisasi memastikan bahwa keputusan dan aktivitas yang berjalan di dalam suatu organisasi benar benar dilaksanakan dengan baik. Bila kita mengaitkannya dengan *fraud pentagon theory*, *opportunity* dari sistem pengendalian internal yang buruk menjadi salah satu faktor terjadinya tindakan kecurangan. *Fraud* yang ditimbulkan oleh faktor ini disebabkan karena pengendalian internal disuatu organisasi belum berjalan dengan efektif dan efisien. Seharusnya keefektifan sistem pengendalian internal di suatu instansi harus berjalan dengan baik, karena semakin baik sistem pengendalian internal maka akan dapat mengurangi tingkat terjadinya kecurangan didalam instansi tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan Zulkarnain (2013) terdapat pengaruh negatif antara keefektifan sistem pengendalian internal terhadap *fraud* di Sektor Pemerintahan. Artinya semakin efektif pengendalian internal instansi, maka semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramudi dkk (2017) yang mengemukakan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap terjadinya kecurangan di instansi pemerintahan, sementara menurut Suroso (2015) terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel keefektifan sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan perilaku fraud, menurut penelitian lainnya Ardianingsih (2016) terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara efektifitas pengendalian internal terhadap kecurangan di sektor pemerintahan dan menurut penelitian Sari (2016) keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap fraud.

H₃: Terdapat Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap kecenderungan melakukan *fraudulent financial reporting*

2.5.4 Pengaruh Perilaku tidak etis Terhadap Kecenderungan Melakukan *Fraudulent Financial Reporting*

Calsia (2019) mendefenisikan etika sebagai asas perilaku yang disepakati dan dilakukan secara umum, terkait hal-hal seperti moral, sesuatu yang benar dan bermartabat. Buckley et al (1998) menjelaskan bahwa perilaku tidak etis merupakan sesuatu yang sulit untuk dimengerti, dikarenakan hal ini terkait dengan adanya hubungan yang rumit antara situasi dengan karakteristik pribadi pelakunya.

Menurut Wilopo (2008), pribadi seseorang menentukan terjadinya kecurangan akuntansi. Organisasi yang memiliki standar etika yang rendah akan memiliki risiko kecurangan akuntansi yang tinggi sehingga menyebabkan seseorang berperilaku tidak etis seperti penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, kedudukan, dan sumber daya. Dengan demikian, dibutuhkan perilaku yang etis dari diri manajemen organisasi sehingga dapat tercipta lingkungan organisasi yang etis. Karyawan akan lebih cenderung menaati peraturan yang telah ditetapkan serta menghindari perbuatan curang yang dapat merugikan perusahaan. CIMA (2002) berpendapat bahwa budaya perusahaan dengan standar etika yang rendah akan memiliki resiko kecurangan akuntansi yang tinggi. Hasil penelitian wilopo (2006) juga menyatakan bahwa perilaku tidak etis memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada perusahaan. Sedangkan dalam penelitian Wilopo (2008) menyatakan bahwa perilaku tidak etis memberikan pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) tetapi tidak signifikan.

H₄: Terdapat pengaruh perilaku tidak etis terhadap kecenderungan melakukan *fraudulent financial reporting*.

2.5.5 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kecenderungan Melakukan *Fraudulent Financial Reporting*

Kompetensi memiliki elemen utama berupa pengetahuan dan keahlian sebagai dasar yang diperlukan organisasi untuk pencapaian tujuan organisasi. Wolfe dan Hermanson menjelaskan terkait elemen *capability/competence* yang penting didalam diri pelaku *fraud* yaitu *Intelligence* dan *creativity*. Pelaku *fraud* dinilai memiliki pemahaman yang cukup dalam memanfaatkan kelemahan sistem pengendalian internal menggunakan posisi, fungsi, ataupun akses berwenang untuk memperoleh keuntungan. Rustendi (2009) menyebutkan bahwa aspek Pendidikan yang dimiliki oleh pelaku *fraud* menarik untuk ditelaah karena umumnya pelaku *fraud* adalah orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi dan mengisi jabatan yang strategis dalam sebuah instansi dan jarang ditemukan pelaku *fraud* yang memiliki posisi yang berada pada manajemen tingkat bawah. Selain itu Indriani dkk (2016) disebutkan bahwa hal tersebut sebagai atribut yang melekat pada pribadinya, pemahaman pegawai (yang berpendidikan tinggi) terhadap sistem organisasional relative lebih baik sehingga dia mengetahui kelemahan sistem dan atau dampak hukum yang mungkin muncul sehingga dia memahami kelemahan sistem dan dampak hukum yang mungkin muncul sehingga risiko terbongkarnya kejahatan dia lakukan dapat diantisipasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indriani dkk (2016) menunjukkan bahwa kompetensi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *fraud*, berangkat dari hal tersebut peneliti ingin mencoba menguji kembali kompetensi kaitannya dengan kecenderungan seseorang melakukan *fraud*.

H₅: Terdapat pengaruh kompetensi terhadap kecenderungan melakukan *fraudulent financial reporting*

2.5.6 Pengaruh Rangkap Jabatan Terhadap Kecenderungan Melakukan *Fraudulent Financial Reporting*

Rangkap jabatan adalah dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam pemerintahan atau organisasi, seperti sekretaris jenderal, kepala biro (UU No. 30 Tahun 2014). Jika pemimpin di dalam suatu institusi melakukan rangkap jabatan akan membuat kemungkinan pimpinan melakukan *fraud* (Akbar, 2017). Kemudian, apabila dalam sebuah institusi mempunyai jabatan rangkap akan ada kemungkinan untuk melakukan *fraud*, karena kebijakan yang diambil akan berdampak pada kemakmuran CEO tersebut (Oktavia, 2017). Menurut Waluyo Komisioner Komisi Aparatur Negara (KASN), hal seperti ini menimbulkan konflik kepentingan dan akan terjadi kecurangan (korupsi). Didalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pejabat dilarang merangkap sebagai komisaris yang berasal dari lingkungan instansi, BUMN dan BUMD. PNS yang merangkap jabatan (komisaris) akan memberi dampak tugas pelayanan publik terabaikan, adanya konflik kepentingan, rawan inervensi, pendapatan ganda, kapasitas/kapabilitas, berpotensi KKN.

Pernyataan diatas didukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Oktavia (2017) yang menunjukkan bahwa CEO yang memiliki jabatan rangkap berpengaruh signifikan dalam mendeteksi terjadinya *fraudulent financial reporting*. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2019) menunjukkan bahwa jabatan rangkap berpengaruh positif terhadap kecenderungan individu melakukan *fraud*.

H₆: Terdapat pengaruh rangkap jabatan terhadap kecenderungan melakukan *fraudulent financial reporting*.